

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut D. Nelson & A. Olson (2024) dalam buku *The Psychology of Prejudice*, stereotip merupakan sebuah proses otomatis kognitif manusia untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan pola-pola tertentu, sehingga dikatakan stereotip merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR, ketika stereotip diterapkan pada pria atau wanita berdasarkan kategori laki-laki atau perempuan, hal itu disebut stereotip gender. Dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa stereotip gender merupakan bentuk dari kekerasan hak asasi manusia. Stereotip gender sendiri didefinisikan sebagai pandangan umum atau prasangka terkait dengan sifat, karakteristik atau peran yang dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, serta tugas yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing gender (Jiménez-Moya et al., 2022).

Stereotip disebutkan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun stereotip yang salah justru dapat melahirkan ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, sampai penghilangan hak-hak dasar (Nur Amalia et al., 2024). Dalam kasus stereotip gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat terdampak dari fenomena tersebut, namun perempuan lebih sering menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya stereotip gender (Prawira Utama et al., 2023). Sebagai contoh, munculnya anggapan bahwa

bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena karena diekspektasikan untuk menjalankan peran tradisionalnya saja sebagai ibu rumah tangga atau pengurus utama pekerjaan domestik, membuat perempuan kesulitan dalam memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, pekerjaan, atau bahkan termarginalkan dalam ruang partisipasi publik.

Dalam sektor ketenagakerjaan, fenomena stereotip gender ini disebut juga sebagai fenomena *glass ceiling* atau pembatas yang tidak terlihat. Pekerja perempuan sering dianggap kurang produktif karena adanya anggapan ketika perempuan memutuskan untuk memiliki anak maka fokusnya akan terpecah sehingga tidak bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan. adanya anggapan tersebut sering membuat perempuan terjebak pada pekerjaan yang informal, sulit untuk mendapatkan promosi jabatan, atau mendapatkan gaji lebih rendah dibanding laki-laki (McRaney et al., 2023). Hal tersebut dibuktikan oleh sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) terkait dengan Global Wage Report tahun 2019 yang menyatakan bahwa perempuan mendapatkan upah lebih rendah sebesar 20% dari laki-laki.

Dalam hal kepemimpinan, perempuan distereotipkan lebih lemah dibandingkan laki-laki baik secara kemampuan fisik maupun kognitif. Perempuan juga dianggap lebih emosional serta kurang tegas sehingga kurang cocok menjadi pemimpin. Akibatnya, perempuan sering kurang dilibatkan dalam mengambil keputusan hal-hal penting, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang dan cenderung ditempatkan pada peran yang dianggap lebih rendah. Hal ini terlihat dalam struktur sosial di tempat kerja, di

mana persentase perempuan yang menempati posisi manajemen jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta dominasi laki-laki dalam politik dan pemerintahan, dimana keterwakilan perempuan masih sangat minim (Ursua, 2019).

Di Indonesia, fenomena ketimpangan gender menjadi sebuah fenomena yang masih terjadi dalam masyarakatnya. Hal ini dibuktikan oleh sebuah laporan *World Economic Forum* terkait dengan *Gender Gap Indeks* tahun 2025, Indonesia menduduki posisi ke 97 dari 148 negara dengan indeks ketimpangan gender sebesar 0,692. Dalam laporan tersebut diketahui partisipasi perempuan dalam pendidikan Magister lebih rendah sebesar 0.03% dibanding laki-laki 0.06%. dari laporan tersebut juga diketahui bahwa ketimpangan partisipasi gender terjadi pada sektor pendidikan tinggi. Selain dari ketimpangan partisipasi pendidikan tinggi, ketimpangan dalam penerimaan upah juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan perempuan mendapatkan upah rata-rata perjam 17% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Penyebab terjadinya fenomena ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia sendiri pernah diteliti oleh Md Mukitlul Islam & Niaz Asadullah pada tahun 2019 lalu. Dalam penelitian komparatif yang melibatkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, alasan ketimpangan gender terus terjadi dan perempuan kesulitan untuk mencapai peningkatan status sosial ekonomi disebabkan oleh adanya norma sosial dan gender yang patriarkis dan langgengnya stereotip dalam masyarakat.

White & Aspinall (2019) bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pernah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana stereotip gender dalam kepemimpinan perempuan dalam politik, representasi perempuan dan tantangan sosial yang dihadapi di Indonesia. Dalam laporannya yang berjudul *“Why does a good women lose? Barriers to women’s political representation in Indonesia”* menyatakan bahwa stereotip gender dan nilai patriarki masih kuat memengaruhi preferensi politik di Indonesia, sehingga menghambat keterwakilan perempuan sebagai pemimpin. Sebanyak 62% responden percaya laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik dan 78,2% mendukung laki-laki sebagai pemimpin komunitas. Selain itu, terdapat stereotip bahwa perempuan kurang tegas dan kurang bertanggung jawab memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dalam partisipasi politik sehingga perempuan kerap ditempatkan pada peran subordinat.

Fenomena kesenjangan, marginalisasi, dan diskriminasi masih dialami oleh perempuan akibat mengakarnya stereotip gender dalam masyarakat. Budaya patriarkis dan seksis dengan adanya anggapan bahwa laki-laki “lebih” dalam segala hal dibanding perempuan membuat perempuan kesulitan dalam menembus *barrier* untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang setara di Indonesia. Fenomena tersebut pada hakikatnya menjadi kebalikan dari nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam segala jenjang pendidikan, serta dijadikan falsafah dan pandangan hidup bangsa. Selain itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila seperti kesetaraan dan keadilan sosial yang seharusnya dapat menjamin fenomena tersebut tidak terjadi malah sebaliknya.

Dari fenomena dan latar belakang diatas, dimana perempuan pada eksistensinya di masyarakat masih sering terdampak dari streotip gender sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan yang terjadi merefleksikan adanya *gap* atau ketidaksesuaian dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi pemantik dari penelitian ini akan dilakukan. Dari permasalahan tersebut kemudian peneliti memutuskan untuk mengajukan penelitian berjudul “Hubungan Pemahaman Nilai Keadilan Sosial dengan Sikap Stereotip Gender Terhadap Perempuan”. Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan kajian keilmuan PKN di masyarakat (*civic community*) yang akan secara objektif mengidentifikasi hubungan dari pemahaman nilai keadilan sosial dengan sikap stereotip gender terhadap perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dituliskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman laki-laki di RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat terkait nilai keadilan sosial?
2. Bagaimana sikap stereotip gender terhadap perempuan di RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat?
3. Apakah terdapat hubungan antara nilai keadilan sosial dengan sikap stereotip gender terhadap perempuan di RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada lingkup pemahaman dan kaitannya dengan sikap. Peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, sehingga memutuskan untuk memberikan batasan yang jelas dan terfokus agar pembahasan tidak meluas. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas hubungan antara pemahaman nilai keadilan sosial (variabel bebas) dengan sikap stereotip gender terhadap perempuan (variabel terikat) pada masyarakat berjenis kelamin laki-laki berusia 18-25 tahun di RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah "Bagaimana hubungan antara pemahaman nilai keadilan sosial dengan sikap stereotip gender terhadap perempuan?"

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai hubungan pemahaman sila kelima Pancasila dengan sikap stereotip gender diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dalam konteks hubungan sosial dan isu-isu kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman teoritis terkait pengaruh pemahaman nilai keadilan sosial terhadap pembentukan

sikap dan perilaku masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi stereotip gender.

2. Secara Praktis

a. Bagi Sekolah

Memberikan gambaran kepada pihak sekolah mengenai pentingnya pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, terutama untuk membangun kesadaran siswa terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengintegrasikan isu gender dalam pendidikan PPKn.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman nilai keadilan sosial dalam membentuk sikap yang lebih inklusif dan adil terhadap peran laki-laki maupun perempuan, serta sebagai panduan untuk mengurangi sikap stereotip gender dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi isu-isu terkait hubungan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku sosial, khususnya dalam konteks penghapusan stereotip gender dan penguatan kesetaraan.